

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Landasan Hukum	6
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.2. Sumber Daya Manusia.....	26
2.3. Aset/Sarana dan Prasarana.....	28
2.4. Kinerja Pelayanan	33
2.4.1. Pelayanan Pada Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.	36
2.4.2. Pelayanan Pada Bidang Pendapatan Daerah.....	36
2.4.3. Pelayanan Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah	37
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kedepan.....	39
2.5.1. Tantangan.....	41
2.5.2. Peluang.....	41
BAB III ISU STRATEGIS.....	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	43
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	45
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	46



3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	49
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	112
BAB VIII PENUTUP	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kedudukan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5
Gambar 2. 1 Tren target pendapatan tahun 2017 – 2020	39
Gambar 2. 2 Grafik target dan realisasi tahun 2017 – 2020	40
Gambar 2. 3 Tren porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah.....	40
Gambar 2. 4 Tren Grafik Belanja Pegawai tahun 2017 – 2020	40



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	27
Tabel 2. 2 Tabel Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	27
Tabel 2. 3 Tabel Pegawai Berdasarkan Pendidikan Struktural.....	28
Tabel 2. 4 Daftar Aset/Sarana dan Prasarana.....	29
Tabel 2. 5 Kinerja Pelayanan	33
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	35
 Tabel 3. 1 Tabel Sinersigitas RPJMD dan Renstra	 47
 Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2021–2026.....	 52
 Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	 53
 Tabel 6. 1 Tabel T-C. 27.....	 57
 Tabel 7. 1 Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	 113



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya jua, buku Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dapat kami susun untuk menentukan arah, tujuan dan kebijakan kedepan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Jambi Mantap 2026

Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Nasional (RPJP). Landasan pemikiran penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 tersebut yaitu:

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang mengamanatkan bahwa setiap lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintah non-departemen menyusun RENSTRA.

Buku Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disampaikan dalam memenuhi Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.



Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 ini kami susun secara sistimatis agar mudah dipahami, isinya menggambarkan acuan umum (*guidance*) rencana, program dan kegiatan lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Demikian buku Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 kami buat, semoga dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, peningkatan kinerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi serta bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi yakni ***“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT 2024”***

Jambi, Januari 2022

KEPALA BPKPD PROVINSI JAMBI

AGUS PIRNGADI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19691215 199003 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku sekaligus pengendali proses perubahan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya alam.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pembangunan Daerah Provinsi Jambi diarahkan untuk dapat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat berdasarkan kondisi, potensi wilayah, tantangan dan tuntutan masyarakat serta dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 285) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 5 dan 6) memberikan dampak yang sangat luas terhadap pelaksanaan Pemerintahan di Daerah. Otonomi yang diberikan pada Daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah sangat berperan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dari proses Anggaran Belanja Dan Anggaran Pendapatan Daerah serta sebagai Koordinator Pendapatan Daerah, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan APBD, mulai

dari proses Perencanaan hingga Evaluasi dan Pelaporan serta Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sejalan dengan itu salah satu sumber pembiayaan yang paling penting untuk kemandirian daerah adalah dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 terdapat lima (5) jenis Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok serta Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD relatif sangat besar sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaannya, untuk menunjang pembiayaan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi.



Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang bersumber dari PAD dan Penerimaan lainnya diharapkan selalu meningkat setiap tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Periode 2021-2026 untuk mendukung belanja pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yaitu JAMBI MANTAP 2021-2026.

Hubungan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang dijadikan acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dokumen perencanaan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (selama 5 tahun), disesuaikan dengan masa waktu kepala daerah terpilih, yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dari kepala daerah, disesuaikan dengan janji-janji ke masyarakat sewaktu sebagai calon menjadi Kepala Daerah. Hal ini berarti dokumen perencanaan tersebut sudah beralih fungsi yang sebelum sebagai dokumen teknis menjadi dokumen politis.

Setiap Organisasi perangkat daerah, diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra PERANGKAT DAERAH), berisikan Gambaran umum; Tugas, Pokok dan Fungsi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan; Program-program serta Kegiatan indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

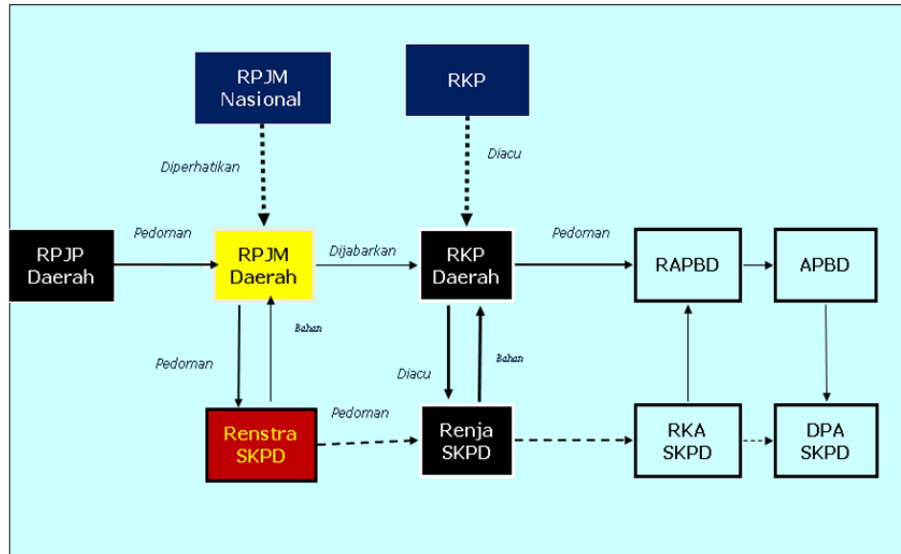
Renstra Perangkat Daerah dijabarkan untuk program tahunan yang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), yang berisikan : kebijakan dan Program serta Kegiatan Pembangunan, yang dilaksanakan selain pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat.

RPJM dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berisikan; Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Ada tiga alasan Pentingnya Perencanaan Strategik;

1. Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk- bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian kegiatan –kegiatan pimpinan dalam organisasi.



Gambar 1. 1 Kedudukan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

a. Maksud

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategis.
2. Sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

b. Tujuan

1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategik.
2. Mengoptimalkan pencapaian pendapatan
3. Orientasi ke masa depan pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan pelayanan publik yang prima
5. Meningkatkan kualitas sumber daya dan sistem informasi



1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Permendagri 90 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jambi 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 - 2026
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi ini terdiri dari 8 (delapan) bab, masing-masing bab memiliki beberapa sub-sub bagian pembahasan.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kedepan

BAB III. ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaah renstra K/L dan Renstra Kab/Kota
- 3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.4. Identifikasi dan Analisis Kekuatan
- 3.5. Identifikasi dan Analisis Kelamahan
- 3.6. Identifikasi dan Analisis Peluang

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri.

Daerah diberi kewenangan, hak untuk mengelola keuangannya secara mandiri serta memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk lebih meningkatkan PAD harus memperhatikan prinsip keadilan dan efektifitas dalam membuat kebijakan terhadap pengelolaan keuangan dan kenaikan Pajak atau Retribusi Daerah yang berlebihan yang akan menyumbat investasi yang imbasnya pada semakin banyaknya pengangguran.

Atas dasar tersebut optimalisasi, efektifitas pengelolaan keuangan daerah serta pendapatan daerah bertujuan meningkatkan pendapatan dan kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan.

Hasil yang diharapkan adalah tata kelola keuangan yang baik serta kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat, hal ini merupakan peluang untuk peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sistem Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi :

1. Penyederhanaan Sistem dan Prosedur proses pengurusan pemungutan pajak dalam rangka efisiensi dan efektifitas.



2. Percepatan pelayanan publik, ketepatan, akuntabel, dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP)
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kepada wajib pajak.
4. Memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat tentang sistem dan prosedur pemungutan serta kebijakan di bidang pendapatan daerah.
5. Pelayanan sistem informasi keuangan daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
6. Pelayanan keuangan dalam pencairan dana SKPD dalam lingkup Provinsi Jambi.
7. Menyediakan system pengelolaan barang milik daerah yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021 adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. Membina dan memfasilitasi bidang pengelolaan

- keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Melaksanakan kesekretariatan Badan;
 5. Melaksanakan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan sistem informasi keuangan daerah;
 6. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; dan
 8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

1. Perencanaan , meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah serta pemungutan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan –perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kepada aparatur pemerintah.

4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan guna mendukung kinerja pemungutan.
5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah serta upaya peningkatan Pendapatan daerah dan pengamanan barang milik daerah.
6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, penetapan tata tarif, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.
8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan keuangan yang baik serta dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah serta realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.
10. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan.
11. Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Pergub Jambi Nomor 12 Tahun

2021 dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan 6 (enam) orang Kepala Bidang dan 10 (sepuluh) orang kepala UPTB pada Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan daerah serta pendapatan daerah, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup Badan dan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan perumusan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Sekretariat dan Badan;
- c. pengoordinasian dan perancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi lingkup Sekretariat meliputi pelayanan perencanaan dan pelaporan

- program, keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, dan pedoman terkait tugas dan fungsi Sekretariat;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkup Badan dan Sekretariat;
 - f. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan, dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
 - i. pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
 - j. pembinaan penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, peralatan, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan;
 - k. pembinaan dan pengembangan perencanaan program dan pelaporan, keuangan dan aset, serta administrasi umum dan kepegawaian;
 - l. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lingkup Badan, dan Laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- m. penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan pelayanan publik Badan;
- n. pengoordinasian penyusunan bahan rancangan peraturan, standar operasional prosedur, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- o. pengoordinasian pengkajian dan verifikasi terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial yang menjadi urusan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pengoordinasian dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
- q. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian melalui lembaga bersertifikasi;
- r. penyelenggaraan rapat majelis TPTGR; dan
- s. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD/SKPKD dan atau RKAP/DPPA SKPD/SKPKD;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau perubahan APBD;
- d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan penjabaran APBD;
- e. penyusunan petunjuk teknis tentang penyusunan anggaran SKPD/SKPKD;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- i. pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota (khusus untuk Perangkat Daerah provinsi); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- g. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan anggaran kas;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- j. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- k. pelaksanaan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- l. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan

- penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ);
- m. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan PERANGKAT DAERAH, BLUD dan PPKD;

- g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- l. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- m. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- n. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan, standar harga barang, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan BMD, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD, Penilaian, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD;
- c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah
- g. pelaksanaan koordinasi penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD;
- h. pelaksanaan koordinasi hasil penilaian BMD
- i. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



6. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan analisa regulasi pendapatan daerah;
- c. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan system informasi pendapatan daerah baik internal maupun eksternal;



- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
- k. perumusan penindakan atas pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan fungsi koordinator pajak daerah pada UPTD pengelolaan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan fungsi koordinator retribusi daerah pada organisasi Perangkat Daerah terkait pemungutan retribusi daerah;
- h. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

- i. pelaksanaan sosilaliasi dan promosi pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pelayanan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pelayanan proses administrasi keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. pelaksanaan rekonsiliasi dan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai perpanjangan tangan dalam penerimaan pendapatan daerah di setiap Kabupaten/Kota telah dibentuk 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang terdiri dari :

1. UPTD Pendapatan Daerah Kota Jambi.
2. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Ma. Jambi.
3. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
4. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
6. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
7. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
8. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
9. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Barat.
10. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Timur.

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Setiap UPTD mempunyai tugas yang sama sebagai berikut:

Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah di bidang pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi

dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- c. Pelaksanaan pendapatan subjek dan objek pajak daerah dan penggalan potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- e. Pelaksanaan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah
- f. Pelaksanaan penagihan
- g. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor
- h. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tata kelola keuangan serta merealisasikan penerimaan pendapatan daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi didukung oleh aparatur /SDM sebanyak 465 orang yang terdiri dari 325 PNS dan 235 orang tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) (yang bertugas/difungsikan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Provinsi Jambi dan 10 UPTD pada Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi) yang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 59 Orang
2. Pejabat Fungsional : 3 Orang
3. Pelaksana : 263 Orang
4. Tenaga PTT : 167 Orang

Sedangkan kondisi kepegawaian dapat diketahui dari tabel dibawah ini :

1. Berdasarkan Pendidikan Formal :

Tabel 2. 1 Tabel Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	0
2.	SLTP	3
3.	SLTA	53
4.	D3	14
5.	S1	194
6.	S2	59
7.	S3	1

2. Berdasarkan Pangkat / Golongan :

Tabel 2. 2 Tabel Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN		JUMLAH
1.	I	A	-
		B	-
		C	-
		D	-
2.	I	A	1
		B	3
		C	11
		D	23
3.	I	A	33
		B	45

4.	I	C	78
		D	98
		A	22
		B	9
		C	2
		D	-

3. Berdasarkan Pendidikan Struktural :

Tabel 2. 3 Tabel Pegawai Berdasarkan Pendidikan Struktural

NO	JABATAN	PIM II	PIM III	PIM IV
1.	ESELON II	-	1	-
2.	ESELON III	-	5	-
3.	ESELON IV	-	7	28
4.	Fungsional Umum	-	5	19

2.3. Aset/Sarana dan Prasarana.

Antara 3 komponen sumber daya BPKPD Provinsi Jambi yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya aset dalam meningkatkan kinerja organisasi saling bersinergis, dengan kata lain masing-masingnya tidak berdiri sendiri, SDM yang baik tidak dapat berjalan secara optimal bila tidak didukung oleh anggaran dan peralatan kerja (asset), anggaran yang besar tidak dapat digunakan dengan maksimal bila tidak didukung oleh SDM dan sarana prasarana, aset yang cukup tidak dapat berfungsi secara maksimal bila tidak didukung SDM dan anggaran. Berikut disajikan daftar asset yang dimiliki BPKPD Provinsi sampai dengan tahun 2021 seperti tabel 2.5 pada halaman berikut.



Tabel 2. 4 Daftar Aset/Sarana dan Prasarana

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KONDISI BARANG		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.		Tanah	469	-	-
2.		Bangunan/Gedung	273		
3.	02.01.08.20.	Pan Mixer	1	-	-
4.	02.03.04.02.	Portable Generating Set	27	8	1
5.	02.03.04.03.	Stationary Generating Set	9	1	1
6.	02.03.05.02.	Portable Water Pump	11	4	1
7.	03.01.01.02.	Jeep	1	-	-
8.	03.01.01.03.	Station Wagon	34	4	-
9.	03.01.02.02.	Bicro Bus (Penumpang 15 - 30 orang)	1	-	-
10.	03.01.02.03.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	4	-	-
11.	03.01.03.01.	Truck + Attachhment	1	-	-
12.	03.01.03.02.	Pick Up	1	1	-
13.	03.01.05.01.	Sepeda Motor	62	11	2
14.	03.01.05.02.	Scooter	9	-	-
15.	04.01.01.18.	Mesin Kompresor	1	-	-
16.	04.02.03.02.	Jembatan Service	15	-	-
17.	04.02.05.02.	Tool Kit Boks	3	-	-
18.	05.02.01.07.	Penyemprot Tangan (Hand Srazer)	1	-	-
19.	06.01.01.01.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	-	1	-
20.	06.01.01.02.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	13	2	2
21.	06.01.01.03.	Mesin Ketik Manual Longewagen (18.)	17	2	-
22.	06.01.02.03.	Mesin Hitung Elektronik	1	-	-
23.	06.01.02.09.	Mesin Absen (Time Recorder)	5	-	-
24.	06.01.02.11.	Mesin calculator	26	-	-
25.	06.01.03.08.	Mesin Photo Copy dengan kertas doble Folio	9	-	-
26.	06.01.04.01.	Lemari Besi/Metal	86	18	1
27.	06.01.04.02.	Rak Besi/Metal	696	34	3
28.	06.01.04.03.	Rak Kayu	-	2	-
29.	06.01.04.04.	Filling Besi/Metal	170	60	14
30.	06.01.04.06.	Band Kas	8	6	-
31.	06.01.04.09.	Rotary Filling	2	-	-
32.	06.01.04.12.	Lemari Kaca	5	7	1
33.	06.01.04.15.	Lemari Loker	1	-	-
34.	06.01.04.21.	Countainer Box	3	-	-
35.	06.01.05.01.	Papan Visuil	80	9	1
36.	06.01.05.05.	Alat Penghancur Kertas	35	-	-
37.	06.01.05.06.	Papan Nama Instansi	50	2	-
38.	06.01.05.07.	Papan Pengumuman	37	1	2
39.	06.01.05.10.	White Board	6	-	-
40.	06.01.05.11.	Alat Detektor Uang Palsu	2	-	-
41.	06.01.05.13.	Copy Board/Elektrik Whit Board	1	-	-
42.	06.01.05.14.	Peta	-	1	-
43.	06.01.05.17.	Mesin Absensi	5	-	-



44.	06.01.05.26.	Perforator Besar	4	-	1
45.	06.01.05.28.	Overhead Projektor	10	-	-
46.	06.01.05.39.	Dispay	6	-	-
47.	06.01.05.42.	door access control	14	-	-
48.	06.01.05.45.	Bendera Merah Putih	3	-	-
49.	06.01.05.46.	Mesin Antrian	3	1	-
50.	06.02.01.01.	Lemari Kayu	88	51	5
51.	06.02.01.02.	Rak Kayu	-	9	-
52.	06.02.01.04.	Meja Kayu/Rotan	4	3	1
53.	06.02.01.05.	Kursi Besi / Metal	310	3	1
54.	06.02.01.06.	Kursi kayu/Rotan/Bambu	27	55	-
55.	06.02.01.09.	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	-	6	-
56.	06.02.01.10.	Meja Rapat	45	1	-
57.	06.02.01.11.	Meja Tulis	20	1	-
58.	06.02.01.12.	Meja Makan	8	2	-
59.	06.02.01.15.	Meja Podium	1	-	-
60.	06.02.01.17.	Meja Resepsion	1	-	3
61.	06.02.01.28.	Kursi Tamu	159	22	4
62.	06.02.01.30.	Kursi Putar	755	157	42
63.	06.02.01.31.	Kursi Biasa	-	7	-
64.	06.02.01.33.	Bangku Tunggu	163	1	-
65.	06.02.01.34.	Kursi Lipat	172	105	21
66.	06.02.01.37.	Meja Komputer	71	25	-
67.	06.02.01.38.	Kasur	5	-	-
68.	06.02.01.47.	Tenda	14	-	-
69.	06.02.01.48.	Meja 1/2 Biro	28	-	-
70.	06.02.01.49.	Sofa	6	-	-
71.	06.02.01.55.	Lemari Rias	-	2	-
72.	06.02.01.63.	Gorden	655	4	-
73.	06.02.02.01.	Jam Mekanis	8	9	-
74.	06.02.02.03.	Jam Elektronik	1	-	-
75.	06.02.03.01.	Mesin Penghisap Debu	2	1	5
76.	06.02.03.03.	Mesin Potong Rumput	10	1	-
77.	06.02.03.06.	Tempat Sampah	-	16	-
78.	06.02.04.01.	Lemari Es	21	-	1
79.	06.02.04.03.	AC Unit	17	-	-
80.	06.02.04.04.	AC Split	262	25	-
81.	06.02.04.06.	Kipas Angin	99	13	7
82.	06.02.04.07.	Exhaust Fan	9	4	-
83.	06.02.04.15.	Alat Penjernih Udara(Air Purifier)	4	-	-
84.	06.02.05.06.	Oven Listrik	1	-	-
85.	06.02.05.11.	Treng Air	20	-	-
86.	06.02.06.03.	Televisi	98	2	1
87.	06.02.06.05.	Amplifier	5	-	1
88.	06.02.06.06.	Equalizer	1	-	-
89.	06.02.06.07.	Loudspeaker	8	1	-
90.	06.02.06.08.	Sound System	4	-	-
91.	06.02.06.12.	Wireless	1	-	-



92.	06.02.06.13.	Megaphone	11	-	-
93.	06.02.06.14.	Microphone	7	-	-
94.	06.02.06.19.	Step Up/Down	39	1	-
95.	06.02.06.22.	Camera Film	1	-	-
96.	06.02.06.23.	Tustel	17	-	-
97.	06.02.06.28.	Lambang Garuda Pancasila	2	2	-
98.	06.02.06.29.	Gambar Presiden/ wakil Presiden	-	1	-
99.	06.02.06.32.	Tiang Bendera	150	-	2
100.	06.02.06.37.	Tangga Alumunium	3	1	-
101.	06.02.06.39.	Dispencer	71	3	2
102.	06.02.06.45.	Lambang Instansi	2	-	-
103.	06.02.06.48.	Coofie Maker	1	-	-
104.	06.02.06.49.	Handy Cam	4	-	-
105.	06.02.06.51.	Tralis	46	-	-
106.	06.02.06.56.	Braket TV	6	-	-
107.	06.02.07.01.	Alat Pemadan/Portable	59	16	4
108.	06.02.07.38.	Kasur/Karpet	7	6	-
109.	06.03.01.03.	Local Area Network (LAN)	38	1	-
110.	06.03.01.04.	Internet	3	-	-
111.	06.03.02.01.	PC Unit	452	34	1
112.	06.03.02.03.	Note Book	211	9	-
113.	06.03.02.06.	Tablet / Pablet / Smart Phone	9	-	-
114.	06.03.03.04.	Storage Modul Disk	3	-	-
115.	06.03.03.12.	Hard Disk	29	-	-
116.	06.03.03.13.	Keyboard	11	-	-
117.	06.03.03.15.	Kamera CCTV	38	-	-
118.	06.03.04.10.	Scanner	2	-	-
119.	06.03.05.02.	Monitor	32	2	-
120.	06.03.05.03.	Printer	502	73	4
121.	06.03.05.06.	Viewer	1	-	-
122.	06.03.05.12.	Rechargable Battery	215	38	1
123.	06.03.05.16.	Web Cam	1	-	-
124.	06.03.06.01.	Server	68	1	-
125.	06.03.06.02.	Router	18	-	-
126.	06.03.06.03.	Hub	43	1	-
127.	06.03.06.04.	Modem	17	-	-
128.	06.03.06.05.	Netware Interface External	1	-	-
129.	06.03.06.06.	Kabel RCA	4	-	-
130.	06.03.07.01.	Antena Sektoral	7	-	-
131.	06.03.07.02.	Radio Pemancar Microlic	4	-	-
132.	06.03.07.05.	Kabel RJ45	13	1	-
133.	06.03.07.06.	Anti Petir Hypelunk	3	-	-
134.	06.03.07.08.	Software	30	3	-
135.	06.04.01.05.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	-
136.	06.04.01.06.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	23	-	-
137.	06.04.01.08.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	669	70	25
138.	06.04.02.11.	Meja Tamu Biasa	11	1	-
139.	06.04.03.04.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	1	-



140.	06.04.03.05.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	19	1	-
141.	06.04.03.06.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	50	-	-
142.	06.04.03.07.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2	-
143.	06.04.07.05.	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	-	1	-
144.	06.04.07.07.	Buffet Kayu	-	3	-
145.	06.04.07.08.	Buffet Kaca	-	5	-
146.	07.01.01.03.	Proyektor + Attachment	3	-	-
147.	07.01.01.09.	Audio Amplifier	1	-	-
148.	07.01.01.40.	Microphone/Wireless Mic	2	-	-
149.	07.01.01.42.	Microphone Connector Box	1	-	-
150.	07.01.01.60.	Battery Charger	-	1	-
151.	07.02.01.08.	Sound System	1	-	-
152.	07.02.01.09.	Telephone (PABX)	-	10	-
153.	07.02.01.11.	Pesawat Telephone	2	4	5
154.	07.02.01.14.	Handy Talky (HT)	1	2	-
155.	07.02.01.20.	Facsimile	17	15	-
156.	07.03.09.01.	Antena UHF Portable	-	1	-
157.	07.03.10.01.	Antena SHF Portable	5	3	1
158.	07.03.20.01.	Self Supporting Tower	1	-	-
159.	09.01.03.02.	Electronic Thermometer	47	-	-
160.	09.01.06.53.	Screen	1	-	-
161.	09.01.18.27.	Rotator	2	-	-
162.	14.01.02.06.	Sumur dengan Pompa	5	-	-
163.	14.06.05.08.	Bangunan Menar/Bak Penampung/Reservok Air Umum	1	-	-
164.	15.01.05.02.	Jaringan Rumah Tangga	2	-	-
165.	15.06.03.01.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	-	-
166.	15.07.01.04.	Instalasi Komunikasi Elektronik (komlek)	-	1	-
167.	16.02.02.03.	Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA	9	-	-



2.4. Kinerja Pelayanan

Tabel 2. 5 Kinerja Pelayanan

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Provinsi Jambi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Renstra SKPD Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Skor IKM							83	84				86,25	87,07				103,92%	103,65%
2	Jumlah Nilai AKIP				BB	BB	BB	BB	BB	40,37	39,65	41,55	75,35	75,11	57,62%	56,64%	59,35%	100%	100%
3	Opini BPK				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase kabupaten/kota yang mendapat WTP				27%	27%	36%	45%	45%	63,6 %	81%	100%	100%	90,90%	235,70%	300%	278%	222%	202%
5	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah				5%	5%	5%	5%	5%		-6,80%	0,89%	-0,67%	-2,30%		-136%	17,80%	-13,40%	-46%

Note : Jumlah Skor IKM dimulai dari tahun 2019



Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah

Provinsi Jambi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Renstra SKPD Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (PBMD)				63,92%	65,00%	66,00%	67,00%	68,00%	99,63%	94,08%	87,73%	99,06%	97,70%	155,87%	144,74%	132,92%	147,85%	143,68%
	Ratio Kenaikan Pendapatan Retribusi dari Barang Milik Daerah terhadap PAD (PBMD)				0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,22%	0,16%	0,058	0,082%	0,082%	0,086%	114,29%	36,25%	45,56%	41%	39,09%



Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Tabel T-C.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah														
Uraian	Anggaran				Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan				Anggaran	Realisasi
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.392.096.182,89	7.206.022.895,00	7.640.061.458,00	7.251.964.159,43	6.542.831.065,00	6.782.089.609,00	7.328.220.683,00	7.086.226.014,00	88,51	94,12	95,92	97,71	7.372.536.173,83	6.934.841.842,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.693.628.350,00	6.757.639.499,00	21.101.262.326,00	6.828.653.720,00	7.931.705.901,00	6.165.701.080,00	17.357.194.414,00	6.593.773.777,05	91,24	91,24	82,26	96,56	10.845.295.973,75	9.512.093.793,01
Program peningkatan disiplin aparatur	139.600.000,00	250.800.000,00	186.000.000,00	211.900.000,00	125.200.000,00	246.800.000,00	181.615.170,00	211.225.900,00	89,68	98,41	97,64	99,68	197.075.000,00	191.210.267,50
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	141.651.105,00	130.794.782,00	133.190.092,00	51.984.000,00	119.429.869,00	122.897.200,00	108.459.475,00	48.153.200,00	84,31	93,96	81,43	92,63	114.404.994,75	99.734.936,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	107.391.800,00	107.391.800,00	332.475.000,00	278.360.436,00	87.324.509,00	103.017.200,00	322.055.030,00	270.765.604,00	81,31	95,93	96,87	97,27	206.404.759,00	195.790.585,75
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.050.076.374,00	12.997.888.724,00	19.475.661.524,00	13.961.968.193,80	10.317.726.319,00	11.906.473.699,00	17.323.024.552,00	12.265.244.624,50	85,62	91,60	88,95	87,85	14.621.398.703,95	12.953.117.298,63
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.099.462.300,00	1.099.462.300,00	1.149.462.300,00	365.934.433,20	1.062.756.441,00	860.067.150,00	955.419.186,00	331.256.520,00	96,66	78,23	83,12	90,52	928.580.333,30	802.374.824,25

Tabel T-C.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Pengelolaan BMD														
Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata-rata Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	517.921.896,00	853.023.840,00	1.368.751.622,00	660.962.043,60	509.722.453,00	834.793.381,00	1.135.405.652,00	659.913.089,00	98,42	97,86	82,95	99,84	850.164.850,40	784.958.643,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.562.280.997,85	9.791.343.533,00	20.894.414.247,64	13.526.805.397,00	6.173.500.546,00	8.590.295.479,00	20.697.939.330,00	13.351.513.705,00	94,08	87,73	99,06	98,70	12.693.711.043,87	12.203.312.265,00
Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.119.646.073,30	4.485.727.027,00	8.121.885.752,00	4.348.439.580,00	2.938.153.913,00	4.293.882.360,00	7.607.643.854,00	4.261.865.334,00	94,18	95,72	93,67	98,01	5.018.924.608,08	4.775.386.365,25



2.4.1. Pelayanan Pada Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Pelayanan Pada Bidang Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting sebagai sumber dana untuk membiayai terselenggaranya roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola



pendapatan daerah sebagai upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang dapat dilihat dengan meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal. Dalam melaksanakan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah terdapat tiga fungsi yang melekat pada c yaitu sebagai salah satu Perangkat Daerah penghasil, PPKD dan pengelola atau sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah. Maka sasaran yang telah ditetapkan dan dicapai selama kurun tahun 2021-2026 oleh BPKPD yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

2.4.3. Pelayanan Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian persentase keakuratan data barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab

BPKPD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing masing SKPD/Unit Kerja dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. di sampaikan kepada Gubernur Jambi melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Badan Pengelola keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab BPKPD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah dan membantu

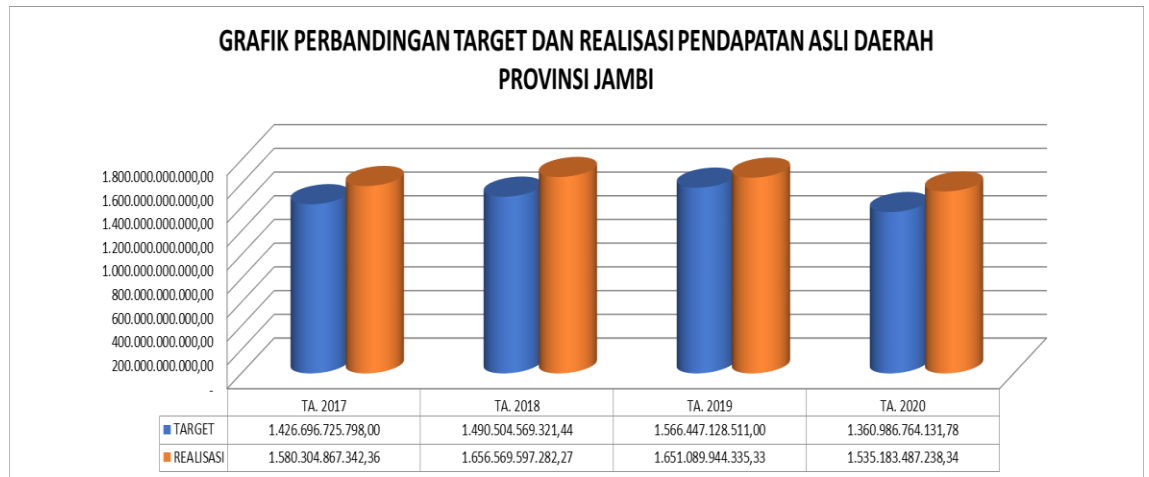
pengelola BMD dalam melaksanakan. Sehingga dengan dilaksanakan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar terdapat kejelasan status kepemilikan barang milik daerah, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan barang milik daerah, dan memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara berkala.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kedepan

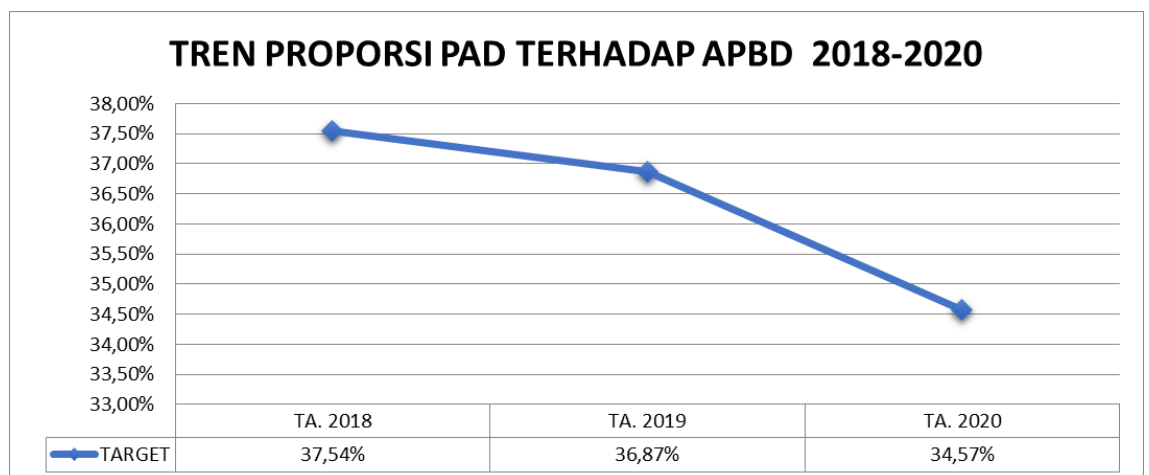
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :



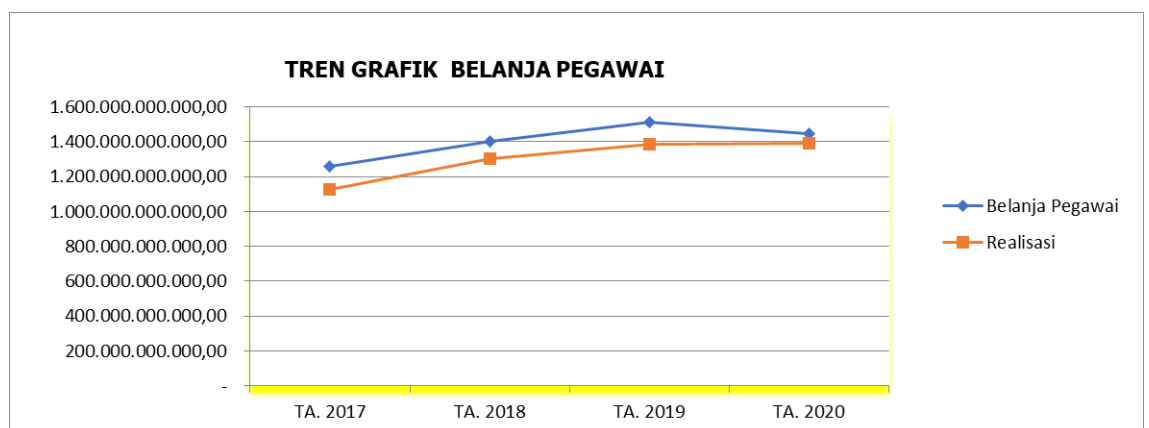
Gambar 2. 1 Tren target pendapatan tahun 2017 – 2020



Gambar 2. 2 Grafik target dan realisasi tahun 2017 – 2020



Gambar 2. 3 Tren porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah



Gambar 2. 4 Tren Grafik Belanja Pegawai tahun 2017 – 2020



2.5.1. Tantangan

1. Indikator standar pemeriksaan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI selalu meningkat setiap tahun;
2. Penguasaan informasi dan teknologi berbasis digital menjadi kebutuhan organisasi dan SDM aparatur;
3. Semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Pengelolaan dan penatausahaan BMD yang tertib menjadi kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan;
5. Masih terdapat wajib pajak dan retribusi yang belum taat dan sadar atas kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran dalam melaksanakan program kegiatan.

2.5.2. Peluang

1. Terdapat SDM aparatur yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi;
2. Terdapat sarana prasarana fasilitas pendukung tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya infrastruktur dan jaringan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki untuk membantu pelaksanaan tugas dan pelayanan publik;
4. Terdapat BMD yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;



5. Terdapat potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dioptimalkan.



BAB III

ISU STRATEGIS

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah adalah Institusi yang diberi wewenang untuk mengimplementasikan Kebijakan Fiskal baik sebagai pengelola keuangan daerah maupun sebagai instansi pemungut pajak daerah serta sebagai koordinator Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi secara teknis mengelola keuangan pemerintah Provinsi Jambi dimulai dari penganggaran sampai ke pelaporan keuangan serta sebagai Koordinator Pendapatan Provinsi Jambi berwenang untuk mengkoordinir Dinas/Instansi pemungut pendapatan daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah suatu peluang bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalisasikan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Ada beberapa isu strategis yang di hadapi secara internal dan eksternal dalam rangka pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pendapatan daerah pada umumnya yaitu

A. Isu Internal

1. Masih adanya BMD di Pemerintah Provinsi Jambi yang belum dioptimalkan dalam pemanfaatannya;
2. Masih ada aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi yang belum bersertipikat;
3. Belum ada petugas/pejabat penilai pemerintah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;

4. Belum optimalnya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi pedoman bagi personil Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
5. Belum terintegrasinya sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan BMD;
6. Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Belum tersedianya sistem informasi retribusi daerah yang berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi);
8. Belum tersedianya Sistem Informasi Pajak Daerah yg komprehensif meliputi semua jenis pelayanan pajak daerah (baru tersedia layanan PKB dan BBNKB).

B. Isu Eksternal

1. Masih adanya aset milik Pemerintah Provinsi Jambi yang dikuasai pihak ketiga/masyarakat;
2. Proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi sangat tergantung dengan terbatasnya petugas juru ukur BPN;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan retribusi untuk membayar pajak dan retribusi;
4. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang tidak stabil sangat berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
5. Masih terdapat pejabat pengelola kegiatan/keuangan pada beberapa PERANGKAT DAERAH yang kurang memahami tentang tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran;

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, dipilih 3 isu strategis terkait dengan :

- ❖ **Kualitas Tata Kelola Keuangan**
- ❖ **Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah**
- ❖ **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2021-2024 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Visi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2021-2026 adalah :

***“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB,
AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH
SWT”.***

Dengan menetapkan Misi Pembangunan Tahun 2021 - 2026, yaitu :

- 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah**
- 3. Memantapkan Kualitas SDM**

Berkaitan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah termasuk ke dalam :

Misi 1 **MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah telah melakukan telaah yang dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Menyusun perencanaan program pembangunan sekaligus pendanaan untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.
- 2) Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bidang Keuangan, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2024.
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi pembangunan nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian, berdasarkan Gotong Royong” visi ini diartikan dimana Indonesia telah sungguh sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia Maju sesuai pada UUD 1945.



Dalam kerangka mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu pembantu Presiden dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional telah menetapkan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3. 1 Tabel Sinersigitas RPJMD dan Renstra

Misi Gubernur Jambi 2021-2024 Jambi Mantap 2024	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Jambi 2021 – 2024
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan tata kelola pemerintahan; 2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah; 3. Memantapkan kualitas sdm 	
<p style="text-align: center;"> Program Pembangunan Daerah Provinsi 2021 – 2026 Program Pengelolaan Keuangan Daerah </p>	

Visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jambi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026 adalah **Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (MANTAP) 2024.**

Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam 3 misi yaitu:

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan;

2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah;
3. Memantapkan kualitas sdm

Dalam kurun waktu 2021-2026, diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Kebijakan ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan akuntabel. Selaras dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Provinsi Jambi menetapkan tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik dan berwibawa
2. Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah

Sedangkan program-program Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jambi Jambi setiap tahunnya, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota merupakan kunci penyelenggaraan tata ruang yang baik. Perwujudan struktur tata ruang Provinsi Jambi yang baik ditandai dengan terbentuknya sistem kota - kota yang dilakukan dengan pengembangan fungsi dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Tata ruang ruang terkait dengan lingkungan hidup. Setiap rencana tata ruang harus memberikan dampak yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya. Diharapkan tahapan tersebut akan mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah menata aset yang dikelolanya sesuai dengan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. Hal ini terlihat dari perijinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam kaitannya pemanfaatan ruang

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu isu Strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal, melalui pendekatan analisis keterkaitan (*linkages analysis*) dan pembobotan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) maka rumusan isu strategis urusan dalam lima tahun mendatang (2021-2026) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan pajak dan retribusi serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi.
3. Peningkatan pengendalian internal terhadap aparatur, sistem dan mekanisme, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
4. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan perangkat daerah terkait, Stakeholder, Organisasi, dalam upaya peningkatan Pendapatan.
5. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian
6. Belum efektif dan efisiennya Pengelolaan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan merupakan perumusan untuk mencapai misi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Penajaman tujuan dari suatu organisasi menentukan keberhasilan pencapaian misi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan kebijakan pembangunan.

Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2021–2026

Tabel T-C.25								
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik dan berwibawa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skor IKM	86	87	88	89	90
			Predikat AKIP	BB	BB	BB	A	A
2	Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	79,50%	84,62%	89,74%	94,86%	100
3	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatkan pendapatan asli daerah	5,25	5,70	6,10	6,40	6,70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah **Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2022 – 2026**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka ditentukan beberapa strategi dan kebijakan yang dirumuskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel T-C.26			
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah			
Visi : TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”.			
Misi 1 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik dan berwibawa	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	1. Mengadakan Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Persemester	1. Pelaksanaan pemenuhan IKM
		2. Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan publik	1. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik
		3. Peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan laporan kinerja	1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur penyusunan dokumen melalui Bimtek dan Pelatihan 2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan SDM yang handal melalui Bimtek dan Pelatihan



2. Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Perbaikan manajemen terhadap pengelolaan keuangan	1. Pemantapan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan yang tepat waktu
		2. Meningkatkan kualitas APBD dari perencanaan sampai pelaporan keuangan	1. Pengembangan system perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi
		3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah	2. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi aparatur
	2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan BMD	1. Pemantapan ketepatan waktu pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada Sistem Operasional Prosedur
		2. Meningkatkan kualitas SDM Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang serta Informasi Barang Milik Daerah	1. Pemantapan kualitas dan peningkatan persentase ASN yang memenuhi kualifikasi standar dan tingkat akurasi data BMD yang disajikan dalam LBMD
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah	1. Meningkatkan pendapatan daerah	1. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	1. Peningkatan koordinasi antar UPTD badan keuangan maupun instansi terkait
			1. Meningkatkan sistem dan kemudahan pelayanan pembayaran pajak daerah melalui e-samsat, samsat keliling dan pos pembantu pelayanan samsat

			2. Meningkatkan kualitas sarana BMD yang dapat disewakan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga
			3. Meningkatkan akurasi database pajak daerah dan retribusi daerah
			4. Meningkatkan akurasi database pajak daerah dan retribusi daerah
		2. Meningkatkan pendapatan daerah lainnya	1. Mendorong Perangkat Daerah untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan DAK dan TP
			2. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan potensi DBH dan DID

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan dan subkegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan program dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk melaksanakan program prioritas yang menjadi unggulan dalam lima tahun kedepan yaitu;



Tabel 6. 1 Tabel T-C. 27

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan 1	Sasaran 1		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				1.46 3.52 1.85 6.77 2		1.57 8.26 9.10 6.25 9		1.79 4.29 4.23 2.87 6		2.06 2.12 3.48 1.20 5		2.42 8.38 1.57 3.48 7		9.32 6.59 0.25 0.59 9		



1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik dan berwibawa	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja pemerintahan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PREDIKAT SAKIP	BB	BB	140.795.432.362	BB	133.218.711.308	BB	146.771.732.723	A	161.686.590.053	A	177.855.249.059	A	760.327.715.504	BP KP D Provinsi Jambi	Jambi
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran	6 Laporan	11 Laporan	888.767.411	11 Laporan	1.071.179.263	11 Laporan	1.347.446.524	11 Laporan	1.636.174.354	11 Laporan	1.799.791.790	55 Laporan	6.743.359.342	BP KP D Provinsi Jambi	Jambi



			Daerah	an, dan Evalu asi Kinerj a Peran gkat Daera h															
			Penyusu nan Dokume n Perencan aan Perangka t Daerah	Jumla h Doku men Perenc anaan Perang kat Daera h	4 Do ku me n	4 Do ku me n	278.5 62.37 0	4 Do ku me n	348.2 02.96 2	4 Do ku me n	487.4 84.14 7	4 Do ku me n	609.3 55.18 4	4 Do ku me n	670.2 90.70 2	25 Do ku me n	2.393 .895. 365	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			Koordina si dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumla h Lapora n Capaia n Kinerja dan Ikhtisa r Realisa si	5 Lap ora n	5 La por an	345.0 05.04 1	5 La por an	431.2 56.30 1	5 La por an	539.0 70.37 6	5 La por an	673.8 37.97 1	5 La por an	741.2 21.76 8	25 La por an	2.730 .391. 456	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



				Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	265.200.000	2 Laporan	291.720.000	2 Laporan	320.892.000	2 Laporan	352.981.200	2 Laporan	388.279.320	10 kali	1.619.072.520	BPKD Provinsi Jambi	Jambi



			Adminis- trasi Keuanga- n Perangk- at Daerah	Jumla- h Period- e Admin- istrasi Peran- gkat Daera- h	12 Bul- an	12 Bu- la- n	103. 154. 615. 200	12 Bu- la- n	113. 470. 076. 900	12 Bu- la- n	124. 817. 084. 800	12 Bu- la- n	137. 298. 793. 400	12 Bu- la- n	151. 028. 672. 740	12 Bu- la- n	629. 769. 243. 040	BP KP D Pro- vin- si Ja- mbi	J a m b i
			Penyedia- an Gaji dan Tunjanga- n Orang	Jumla- h Orang yang Meneri- ma Gaji dan Tunjan- gan Orang	30 9 Ora- ng	30 9 Or- ang	102.2 30.88 9.300	30 9 Or- ang	112.4 53.97 8.300	30 9 Or- ang	123.6 99.37 6.200	30 9 Or- ang	136.0 69.31 3.900	30 9 Or- ang	149.6 76.24 5.290	1.2 36 Or- ang	624.1 29.80 2.990	BP KP D Pro- vin- si Ja- mbi	J a m b i
			Penyedia- an Admini- strasi Pelaksana- an Tugas Orang	Jumla- h Doku- men Hasil Penyed- iaan Admini- strasi Pelaks- anaan Tugas	4 Do- ku- me- n	4 Do- ku- me- n	829.5 30.30 0	4 Do- ku- me- n	912.4 83.40 0	4 Do- ku- me- n	1.003 .731. 800	4 Do- ku- me- n	1.104 .105. 000	4 Do- ku- me- n	1.214 .515. 500	20 Do- ku- me- n	5.064 .366. 000	BP KP D Pro- vin- si Ja- mbi	J a m b i



			Orang																
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	94.195.600	1 Dokumen	103.615.200	1 Dokumen	113.976.800	1 Dokumen	125.374.500	1 Dokumen	137.911.950	5 Dokumen	575.074.050	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	1.013.440.495	100%	1.114.784.545	100%	1.226.262.999	100%	1.348.889.299	100%	1.483.778.229	100%	6.187.155.566	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan	4 Dokumen	4 Dokumen	110.000.136	4 Dokumen	121.000.150	4 Dokumen	133.100.165	4 Dokumen	146.410.181	4 Dokumen	161.051.199	4 Dokumen	671.561.832	BPKPD Provinsi	Jambi



			Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD													Jambi	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	12 Dokumen	414.433	455.887.645	501.476.409	551.624.050	606.786.455	0	2.530.217.871				BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	4 Laporan	4 Laporan	128.997.890	141.897.679	156.087.447	171.696.192	188.865.811	0	787.545.021				BPKPD Provinsi Jambi	Jambi



				Daerah SKPD															
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	179.9 99.87 8		197.9 99.86 6		217.7 99.85 2		239.5 79.83 7		263.5 37.82 1	0	1.098 .917. 254	BP KPD Provinsi Jambi	Jambi
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	12 Laporan	12 Laporan	179.9 99.27 7		197.9 99.20 5		217.7 99.12 6		239.5 79.03 8		263.5 36.94 2	0	1.098 .913. 588	BP KPD Provinsi Jambi	Jambi



				Daerah pada SKPD															
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD												-	0	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	100%	100%	1.254.000,00	100%	1.354.600,00	100%	1.552.060,00	100%	1.790.966,00	100%	1.970.062,60	100%	7.921.688,60	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi



			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	248.000.000	35 Orang	248.000.000	40 Orang	334.800.000	45 Orang	451.980.000	50 Orang	497.178.000	200 Orang	1.779.958.000	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	351.000.000	1 Paket	386.100.000	1 Paket	424.710.000	1 Paket	467.181.000	1 Paket	513.899.100	5 Paket	2.142.890.100	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
			Pemindahan Tugas Orang	Jumlah Orang yang Dipind	10	10 Orang	80.000.000	10 Orang	88.000.000	10 Orang	96.800.000	10 Orang	106.480.000	10 Orang	117.128.000	50 Orang	488.408.000	BP KPD Provin	J a m b i



				ahtuga skan														si Ja mb i	
			Peningka tan Sarana dan Prasaran a Disiplin Pegawai	Jumla h Unit Pening katan Sarana dan Prasaran a Disipli n Pegaw ai	1 Sa pra s	11 Uni t	250.0 00.00 0	11 Uni t	275.0 00.00 0	11 Uni t	302.5 00.00 0	11 Uni t	332.7 50.00 0	11 Uni t	366.0 25.00 0	55 Uni t	1.526 .275. 000	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			Monitori ng, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumla h Doku men Monito ring, Evalua si, dan Penilai an Kinerja Pegaw ai	4 Do ku me n	4 Do ku me n	150.0 00.00 0	4 Do ku me n	165.0 00.00 0	4 Do ku me n	181.5 00.00 0	4 Do ku me n	199.6 50.00 0	4 Do ku me n	219.6 15.00 0	5 Do ku me n	915.7 65.00 0	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	175.000.000	35 Orang	192.500.000	40 Orang	211.750.000	45 Orang	232.925.000	50 Orang	256.217.500	200 Orang	1.068.392.500	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum	100%	100%	5.127.818.728	100%	5.640.600.800	100%	6.204.661.200	100%	6.825.127.600	100%	7.507.640.360	100%	31.305.848.688	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket	255.640.000	1 Paket	281.204.000	1 Paket	309.324.400	1 Paket	340.256.900	1 Paket	374.282.590	5 Paket	1.560.707.890	BP KPD Provinsi	J a m b i



			enerangan Bangunan Kantor	si Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														Jambi	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.805 .659. 628	1 Paket	1.986 .225. 600	1 Paket	2.184 .848. 200	1 Paket	2.403 .333. 100	1 Paket	2.643 .666. 410	5 Paket	11.02 3.732 .938	BP KPD Provinsi Jambi	Jambi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	851.4 06.40 0	1 Paket	936.5 47.10 0	1 Paket	1.030 .201. 900	1 Paket	1.133 .222. 100	1 Paket	1.246 .544. 310	5 Paket	5.197 .921. 810	BP KPD Provinsi Jambi	Jambi



			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.445.335.900	1 Paket	1.589.869.500	1 Paket	1.748.856.500	1 Paket	1.923.742.200	1 Paket	2.116.116.420	5 Paket	8.823.920.520	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	147.169.100	4 Dokumen	161.886.100	4 Dokumen	178.074.800	4 Dokumen	195.882.300	4 Dokumen	215.470.530	20 Dokumen	898.482.830	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	159.060.000	12 Laporan	174.966.000	12 Laporan	192.462.600	12 Laporan	211.708.900	12 Laporan	232.879.790	60 Laporan	971.077.290	BPKPD Provinsi	Jambi



				Kunjungan Tamu														Jambi	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	463.547.700	12 Laporan	509.902.500	12 Laporan	560.892.800	12 Laporan	616.982.100	12 Laporan	678.680.310	60 Laporan	2.830.005.410	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	15.895.659.628	100%	1.656.225.600	100%	1.821.848.200	100%	2.004.033.100	100%	2.204.436.410	100%	23.582.202.938	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi



				h															
			Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumla h Unit Peralat an dan Mesin Lainny a yang Disedi akan	50 Unit	50 Unit	1.505 .659. 628	50 Unit	1.656 .225. 600	50 Unit	1.821 .848. 200	50 Unit	2.004 .033. 100	50 Unit	2.204 .436. 410	25 0 Unit	9.192 .202. 938	BP KP D Pro vin si Ja mbi	J a m bi
			Pengadaa n Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Jumla h Unit Kendar aan Perora ngan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabata n yang Disedi akan	3 Unit	3 Unit	900.0 00.00 0								- 0	0	900.0 00.00 0	BP KP D Pro vin si Ja mbi	J a m bi
			Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasio nal atau	Jumla h Unit Kendar aan Dinas Operas			3.950 .000. 000		-							0	3.950 .000. 000	BP KP D Pro vin si	J a m bi



			Lapangan	ional atau Lapangan yang Disedi akan														Jambi	
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun	2 Gedung	2 Gedung	9.540.000.000	-							0	9.540.000.000		BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2.525.262.800	100%	2.777.789.200	100%	3.055.568.300	100%	3.361.125.300	100%	3.697.237.830	100%	15.416.983.430	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.408.300	12 Laporan	81.849.200	12 Laporan	90.034.200	12 Laporan	99.037.700	12 Laporan	108.941.470	60 Laporan	454.270.870	BPKPD Provinsi	Jambi



				Penyediaan Jasa Surat Menyurat														vin si Ja mb i	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedi akan	12 Lap ora n	12 La por an	1.442 .948. 500	12 La por an	1.587 .243. 400	12 La por an	1.745 .967. 800	12 La por an	1.920 .564. 600	12 La por an	2.112 .621. 060	60 La por an	8.809 .345. 360	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4 Lap ora n	4 La por an	1.007 .906. 000	4 La por an	1.108 .696. 600	4 La por an	1.219 .566. 300	4 La por an	1.341 .523. 000	4 La por an	1.475 .675. 300	20 La por an	6.153 .367. 200	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



				Kantor yang Disedi akan															
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	10.935.868.100	100%	6.133.455.000	100%	6.746.800.700	100%	7.421.481.000	100%	8.163.629.100	100%	39.401.233.900	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	69	69 Unit	1.635.964.000	69 Unit	1.799.560.400	69 Unit	1.979.516.500	69 Unit	2.177.468.200	69 Unit	2.395.215.020	345 Unit	9.987.724.120	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i



				Pajaknya															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	100 Unit	1.635.964.000	100 Unit	1.799.560.400	100 Unit	1.979.516.500	100 Unit	2.177.468.200	100 Unit	2.395.215.020	500 Unit	9.987.724.120	BP KP D Provinsi Jambi	Jambi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelih	30 Unit	30 Unit	369.677.000	30 Unit	406.644.700	30 Unit	447.309.200	30 Unit	492.040.200	30 Unit	541.244.220	150 Unit	2.256.915.320	BP KP D Provinsi Jambi	Jambi



				ara														i	
			Pemeliha raan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	Jumla h Gedun g Kantor dan Bangu nan Lainny a yang Dipelih ara/Di rehabil itasi	25 Ge du ng	25 Uni t	7.294 .263. 100	25 Uni t	2.127 .689. 500	25 Uni t	2.340 .458. 500	25 Uni t	2.574 .504. 400	25 Uni t	2.831 .954. 840	12 5 Uni t	17.16 8.870 .340	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
Tuj uan 2	Sas ara n		PROGRA M PENGEL OLAAN KEUANG AN DAERAH	OPINI BPK	WT P	WT P	1.29 7.18 6.78 2.90 5	WT P	1.41 6.78 8.27 6.86 8	WT P	1.61 6.04 9.71 2.28 7	WT P	1.86 5.81 1.09 2.05 6	WT P	2.21 1.86 0.95 1.26 2	WT P	8.40 7.69 6.81 5.37 7	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



1. Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran yang disusun tepat waktu	Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	10 Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	17.444.191.64	BP KP D Provinsi Jambi	Jambi		
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	311.327.363	2 Dokumen	326.893.730	2 Dokumen	343.238.417	2 Dokumen	36.040.033	2 Dokumen	39.644.036	10 Dokumen	1.057.143.579	BP KP D Provinsi Jambi	Jambi



			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD	2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD	1.609.298.408	2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD	1.689.763.328	2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD	1.774.251.494	2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD	2.217.814.368	2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD	2.439.595.805	10 Perda APBD dan 10 Perkada Penjabaran APBD	9.730.723.402	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan	2 Dokumen	2 Dokumen	263.988.740	2 Dokumen	290.387.614	2 Dokumen	319.426.376	2 Dokumen	351.369.013	2 Dokumen	386.505.915	10 Dokumen	1.611.677.659	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i



			Anggaran	kan Bidang Anggar an														i	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	210.2 83.57 2	2 Dokumen	231.3 11.93 0	2 Dokumen	379.6 67.01 5	2 Dokumen	417.6 33.71 7	2 Dokumen	459.3 97.08 9	10 Dokumen	1.698 .293. 323	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	321.2 00.00 0	2 Dokumen	353.3 20.00 0	2 Dokumen	388.6 52.00 0	2 Dokumen	427.5 17.20 0	2 Dokumen	470.2 68.92 0	10 Dokumen	1.960 .958. 120	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i



			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	43 Orang	43 Orang	226.961.570	43 Orang	249.657.727	43 Orang	274.623.500	43 Orang	302.085.850	43 Orang	332.294.435	215 Orang	1.385.623.081	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Kab/Kota yang disusu	11 SK	11 SK	1.159.505.465	11 SK	1.258.692.419	11 SK	1.384.561.661	11 SK	1.516.731.479	11 SK	1.668.404.627	55 SK	6.987.895.651	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i



				<i>n tepat waktu</i>															
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	11 SK	11 SK	313.774.393	11 SK	345.151.832	11 SK	379.667.015	11 SK	417.633.717	11 SK	459.397.089	55 SK	1.915.624.045	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan	11 SK	11 SK	259.005.309	11 SK	284.905.840	11 SK	313.396.424	11 SK	344.736.067	11 SK	379.209.673	55 SK	1.581.253.313	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i



		n/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota	ran Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	11 SK	11 SK	310.547.868	11 SK	332.729.859	11 SK	366.002.845	11 SK	399.275.831	11 SK	439.203.414	55 SK	1.847.759.817	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
--	--	--	--	---	-------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	---------------	--------------------------------	-----------------------



				g Penjab aran Pertan ggungj awaba n Pelaks anaan APBD Kabup aten/K ota															
			Pembina an Impleme ntasi Sistem Informasi Pemerint ahan Daerah bidang Keuanga n Daerah Kabupate n/Kota	Jumla h Orang yang Mengi kuti Pembina naan Imple menta si Sistem Inform asi Pemer intahan Daera h Bidang Keuan	36 Ora ng	36 Or an g	276.1 77.89 5	36 Or an g	295.9 04.88 8	36 Or an g	325.4 95.37 6	36 Or an g	355.0 85.86 5	36 Or an g	390.5 94.45 2	18 0 Or an g	1.643 .258. 475	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m b i



				gan Daerah Kabupaten/Kota															
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi Perbendaharaan Daerah	100%	100%	1.743.929.064	100%	1.978.558.478	100%	2.331.746.562	100%	2.776.380.496	100%	3.054.018.545	100%	11.884.633.144	BP KPD Provinsi Jambi	Jambi
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	315.218.114	12 Dokumen	409.783.548	12 Dokumen	532.718.612	12 Dokumen	692.534.196	12 Dokumen	761.787.615	60 Dokumen	2.712.042.084	BP KPD Provinsi Jambi	Jambi



			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	12 Dokumen	460.560.000	12 Dokumen	490.429.000	12 Dokumen	570.652.000	12 Dokumen	670.500.650	12 Dokumen	737.550.715	60 Dokumen	2.929.692.365	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	602.700.950	12 Dokumen	682.700.930	12 Dokumen	762.700.950	12 Dokumen	852.700.650	12 Dokumen	937.970.715	60 Dokumen	3.838.774.195	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi



			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	365.450.000	12 Dokumen	395.645.000	12 Dokumen	465.675.000	12 Dokumen	560.645.000	12 Dokumen	616.709.500	60 Dokumen	2.404.124.500	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
--	--	--	---	--	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	---------------	----------------------	-------



			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	810.403.955	100%	951.114.598	100%	1.130.168.219	100%	1.376.963.487	100%	1.514.659.836	100%	5.783.310.094	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan	12 Dokumen	12 Dokumen	176.255.210	12 Dokumen	220.319.013	12 Dokumen	286.414.716	12 Dokumen	400.980.603	12 Dokumen	441.078.663	60 Dokumen	1.525.048.205	BP KD Provinsi Jambi	Jambi



				patan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban																
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	1 Per da da n 1 Per kada	1 Do ku me n Per da da n 1 Do ku me n Per kada	332.3 19.66 0	1 Do ku me n Per da da n 1 Do ku me n Per kada	398.7 83.59 2	1 Do ku me n Per da da n 1 Do ku me n Per kada	478.5 40.31 0	1 Do ku me n Per da da n 1 Do ku me n Per kada	574.2 48.37 2	1 Do ku me n Per da da n 1 Do ku me n Per kada	631.6 73.21 0	5 Do ku me n Per da da n 5 Do ku me n Per kada	2.415 .565. 145	BP KP D Pro vin si Ja mbi	J a m bi	



			Penjabar an Pertangg ungjawab an Pelaksan aan APBD Provinsi	Kepala Daera h tentan g Penjab aran Pertan ggungj awaba n Pelaks anaan APBD Provin si															
			Penyusu nan Tanggapa n/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertangg ungjawab an Pelaksan aan APBD	Jumla h Doku men Tangga pan/Ti ndak Lanjut terhad ap LHP BPK atas Lapora n Pertan ggungj awaba	1 Do ku me n	1 Do ku me n	113.8 23.52 9	1 Do ku me n	125.2 05.88 1	1 Do ku me n	137.7 26.46 9	1 Do ku me n	151.4 99.11 6	1 Do ku me n	166.6 49.02 8	1 Do ku me n	694.9 04.02 4	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



				n Pelaks anaan APBD															
			Koordina si, Sinkronis asi, dan Penyeles aian Tuntutan Perbenda haraan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumla h Doku men Hasil Koordi nasi, Sinkro nisasi, dan Penyel esaian Tuntut an Perben dahara an dan Tuntut an Kerugi an Daera h	10 Do ku me n	10 Do ku me n	60.55 2.910	10 Do ku me n	66.60 8.201	10 Do ku me n	73.26 9.021	10 Do ku me n	80.59 5.923	10 Do ku me n	88.65 5.516	50 Do ku me n	369.6 81.57 1	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			Penyusu nan Kebijaka n dan Panduan	Jumla h Kebija kan dan	1 keb ijak an	1 Do ku me n	127.4 52.64 6	1 Do ku me n	140.1 97.91 1	1 Do ku me n	154.2 17.70 2	1 Do ku me n	169.6 39.47 2	1 Do ku me n	186.6 03.41 9	5 Do ku me n	778.1 11.15 0	BP KP D Pro vin	J a m bi



			Teknis Operasio nal Penyelen ggaraan Akuntan si Pemerint ah Daerah	Pandu an Teknis Operas ional Penyel enggar aan Akunt ansi Pemer intah Daera h		Ke bij ak an		Ke bij ak an		Ke bij ak an		Ke bij ak an		Ke bij ak an		Ke bij ak an		si Ja mb i	
			Penunja ng Urusan Kewena ngan Pengelol aan Keuanga n Daerah	Persen tase penyel esaian Urusa n Kewen angan Pengel olaan Keuan gan Daera h	10 0%	10 0%	1.29 0.09 4.87 0.89 9	10 0%	1.40 8.96 4.24 3.10 2	10 0%	1.60 7.13 0.17 6.31 2	10 0%	1.85 5.64 7.05 5.50 0	10 0%	2.20 0.68 0.51 1.05 0	10 0%	8.36 2.51 6.85 6.86 2	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m b i
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumla h Lapora n Hasil Analisi	1 Lap ora n	1 La por an	147.1 02.07 9	1 La por an	147.1 02.07 9	1 La por an	147.1 02.07 9	1 La por an	147.1 02.07 9	1 La por an	161.8 12.28 7	5 La por an	750.2 20.60 2	BP KP D Pro vin	J a m b i



			Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	s Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														si Ja mb i	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Lap ora n	12 La por an	300.0 00.00 0.000	12 La por an	350.0 00.00 0.000	12 La por an	472.5 00.00 0.000	12 La por an	637.8 75.00 0.000	12 La por an	861.1 31.25 0.000	60 La por an	2.621 .506. 250.0 00	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	4 Laporan	310.571.182.254	4 Laporan	311.502.895.801	4 Laporan	312.437.404.489	4 Laporan	313.374.716.702	4 Laporan	344.712.188.372	20 Laporan	1.592.598.387.619	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m b i
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	679.376.586.566	4 Laporan	747.314.245.222	4 Laporan	822.045.669.744	4 Laporan	904.250.236.719	4 Laporan	994.675.260.391	20 Laporan	4.147.661.998.642	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m b i
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Persentase Pengolaan Data dan Implementasi Sistem	100%	100%	435.013.869	100%	494.333.943	100%	593.200.731	100%	741.500.914	100%	815.651.005	100%	3.079.700.462	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m b i



			Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah														
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	17 2 Orang	17 2 Orang	435.0 13.86 9	17 2 Orang	494.3 33.94 3	17 2 Orang	593.2 00.73 1	17 2 Orang	741.5 00.91 4	17 2 Orang	815.6 51.00 5	86 0 Orang	3.079 .700. 462	BP KPD Provinsi Jambi



				ntah Provin si																
	2. Men ing kat kan kua lita s pen gelo laan Bar ang Mili k Dae rah		PROGRA M PENGEL OLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persen tase Penga mana n Baran g Milik Daera h		79, 50 %	7.48 8.47 6.81 5	84, 62 %	9.05 6.13 7.47 4	90 %	10.8 37.3 30.2 66	94. 86 %	12.4 90.4 03.7 78	10 0%	14.3 16.4 38.3 18	10 0%	54.1 88.7 86.6 51	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m b i	
			Pengelol aan Barang Milik Daerah	Persen tase Penga mana n Baran g Milik Daera h		79, 50 %	79, 50 %	7.48 8.47 6.81 5	79, 67 %	9.05 6.13 7.47 4	10 0%	10.8 37.3 30.2 66	10 0%	12.4 90.4 03.7 78	10 0%	14.3 16.4 38.3 18	10 0%	54.1 88.7 86.6 51	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m b i



			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	427.956.961	1 Dokumen	513.548.353	1 Dokumen	616.258.024	1 Dokumen	708.696.727	1 Dokumen	815.001.237	5 Dokumen	3.081.461.302	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	527.956.961	1 Dokumen	633.548.353	1 Dokumen	760.258.024	1 Dokumen	874.296.727	1 Dokumen	1.005.441.237	5 Dokumen	3.801.501.302	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	1 Dokumen	1 Dokumen	360.976.933	1 Dokumen	433.172.320	1 Dokumen	519.806.784	1 Dokumen	597.777.801	1 Dokumen	687.444.471	5 Dokumen	2.599.178.308	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi



			Daerah	Daerah														i	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	277.956.961	1 Dokumen	333.548.353	1 Dokumen	400.258.024	1 Dokumen	460.296.727	1 Dokumen	529.341.237	5 Dokumen	2.001.401.302	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	727.956.961	12 Laporan	873.548.353	12 Laporan	1.048.258.024	12 Laporan	1.205.496.727	12 Laporan	1.386.321.237	60 Laporan	5.241.581.302	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	622.692.358	12 Laporan	747.230.830	12 Laporan	896.676.996	12 Laporan	1.031.178.545	12 Laporan	1.185.855.327	60 Laporan	4.483.634.055	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi



				h															
			Pengama nan Barang Milik Daerah	Jumla h Lapora n Hasil Penga manan Barang Milik Daera h	4 Lap ora n	4 La por an	2.150 .173. 517	4 La por an	2.650 .173. 517	4 La por an	3.150 .173. 517	4 La por an	3.650 .173. 517	4 La por an	4.150 .173. 517	20 La por an	15.75 0.867 .585	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumla h Lapora n Hasil Penilai an Barang Milik Daera h dan Hasil Koordi nasi Penilai an Barang Milik Daera h	4 Lap ora n	4 La por an	289.5 78.99 3	4 La por an	347.4 94.79 1	4 La por an	416.9 93.75 0	4 La por an	479.5 42.81 2	4 La por an	551.4 74.23 4	20 La por an	2.085 .084. 581	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



			Pengawasan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Penguasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	311.776.985	4 Laporan	374.132.382	4 Laporan	448.958.858	4 Laporan	516.302.687	4 Laporan	593.748.090	20 Laporan	2.244.919.003	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	12 Dokumen	12 Dokumen	539.076.637	12 Dokumen	646.891.964	12 Dokumen	776.270.357	12 Dokumen	892.710.911	12 Dokumen	1.026.617.548	60 Dokumen	3.881.567.417	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi



				apusa n Barang Milik Daera h															
			Rekonsili asi dalam rangka Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah	Jumla h Lapora n Hasil Rekon siliasi dalam rangka Penyus unan Lapora n Barang Milik Daera h	2 Lap ora n	2 La por an	277.9 56.96 1	2 La por an	333.5 48.35 3	2 La por an	400.2 58.02 4	2 La por an	460.2 96.72 7	2 La por an	529.3 41.23 7	10 La por an	2.001 .401. 302	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah	Jumla h Lapora n Barang Milik Daera h yang Disusu n	1 Lap ora n	1 La por an	527.9 56.96 1	1 La por an	633.5 48.35 3	1 La por an	760.2 58.02 4	1 La por an	874.2 96.72 7	1 La por an	1.005 .441. 237	5 La por an	3.801 .501. 302	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	446.459.626	12 Orang	535.751.551	12 Orang	642.901.861	12 Orang	739.337.141	12 Orang	850.237.712	60 Orang	3.214.687.891	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i
Tujuan 3	Sasaran		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%	5,25%	18.051.164.690	5,70%	19.205.980.609	6,10%	20.635.457.600	6,40%	22.135.395.318	6,70%	24.348.934.849	6,70%	104.376.933.066	BP KPD Provinsi Jambi	J a m b i



<i>Men ing kat kan ke ma mp uan keu ang an dae rah unt uk me mbi aya i pem ban gun an dae rah</i>	<i>Men ing kat kan pen dap ata n dae rah</i>	<i>Kegiata n Pengelol aan Pendapa tan Daerah</i>	<i>Persen tase Penin gkata n Penda patan Asli Daera h</i>	<i>5%</i>	<i>5,2 5%</i>	<i>18.0 51.1 64.6 90</i>	<i>5,7 0%</i>	<i>19.2 05.9 80.6 09</i>	<i>6,1 0%</i>	<i>20.6 35.4 57.6 00</i>	<i>6,4 0%</i>	<i>22.1 35.3 95.3 18</i>	<i>6,7 0%</i>	<i>24.3 48.9 34.8 49</i>	<i>6,7 0%</i>	<i>104. 376. 933. 066</i>	<i>BP KP D Pro vin si Ja mb i</i>	<i>J a m b i</i>
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusu	Jumla h Lapora n Penge mbang an Pajak	4 Lap ora n	4 La por an	1.045 .719. 219	4 La por an	1.098 .005. 180	4 La por an	1.152 .905. 439	4 La por an	1.210 .550. 711	4 La por an	1.331 .605. 782	4 La por an	5.838 .786. 332	BP KP D Pro vin si Ja mb	J a m bi



			nan Kebijaka n Pajak Daerah.	daerah dan Kebija kan Pajak Daera h														i	
			Penyuluh an dan Penyebar luasan Kebijaka n Pajak Daerah	Jumla h Lapora n Pelaks anaan Penyul uhan dan Penyeb arluas an Kebija kan Pajak Daera h	12 Lap ora n	12 La por an	6.805 .983. 948	12 La por an	7.078 .223. 306	12 La por an	7.361 .352. 239	12 La por an	7.655 .806. 328	12 La por an	8.421 .386. 961	12 La por an	37.32 2.752 .782	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			Penyedia an Sarana dan Prasaran a Pengelola an Pajak Daerah	Jumla h Sarana dan Prasar ana Pengel olaan Pajak	49	49 Sar an a da n Pra sar an	4.858 .527. 664									49 Sa pra s	4.858 .527. 664	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



				Daerah		a													
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Sarana dan Prasarana			7 Sarana dan Prasarana	744.442.859	7 Sarana dan Prasarana	767.876.192	7 Sarana dan Prasarana	794.658.826	7 Sarana dan Prasarana	850.902.357	35 Sarana dan Prasarana	3.157.880.233	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Sarana dan Prasarana			10 Sarana dan Prasarana	432.633.035	10 Sarana dan Prasarana	458.125.701	10 Sarana dan Prasarana	484.908.335	10 Sarana dan Prasarana	541.151.866	50 Sarana dan Prasarana	1.916.818.936	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengel	3 Sarana dan Prasar			3 Sarana dan Prasar	432.633.035	3 Sarana dan Prasar	458.125.701	3 Sarana dan Prasar	484.908.335	3 Sarana dan Prasar	541.151.866	15 Sarana dan Prasar	1.916.818.936	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi

BPKPD Provinsi Jambi



			n Batangha ri	olaan Pajak Daera h	ana			sar an a		sar an a		sar an a		sar an a		sar an a		mb i	
			UPTD- PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupate n Tanjab Barat	Jumla h Sarana dan Prasar ana Pengel olaan Pajak Daera h	4 Sar ana da n Pra sar ana			4 Sar an a da n Pra sar an a	432.6 33.03 5	4 Sar an a da n Pra sar an a	458.1 25.70 1	4 Sar an a da n Pra sar an a	484.9 08.33 5	4 Sar an a da n Pra sar an a	541.1 51.86 6	20 Sar an a da n Pra sar an a	1.916 .818. 936	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			UPTD- PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupate n Tanjab Timur	Jumla h Sarana dan Prasar ana Pengel olaan Pajak Daera h	4 Sar ana da n Pra sar ana			4 Sar an a da n Pra sar an a	409.7 29.66 5	4 Sar an a da n Pra sar an a	435.1 13.31 1	4 Sar an a da n Pra sar an a	461.8 95.94 4	4 Sar an a da n Pra sar an a	518.1 39.47 5	20 Sar an a da n Pra sar an a	1.824 .878. 395	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			UPTD- PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupate	Jumla h Sarana dan Prasar ana Pengel	4 Sar ana da n Pra sar			4 Sar an a da n Pra	475.1 22.77 9	4 Sar an a da n Pra	500.8 17.69 7	4 Sar an a da n Pra	527.6 00.33 0	4 Sar an a da n Pra	583.8 43.86 1	4 Sar an a da n Pra	2.087 .384. 667	BP KP D Pro vin si Ja	J a m bi

BPKPD Provinsi Jambi



			n Tebo	olaan Pajak Daerah	ana			sar an a		sar an a		sar an a		sar an a		sar an a		mb i	
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengel olaan Pajak Daerah	4 Sar ana da n Pra sar ana			4 Sar an a da n Pra sar an a	553.612.237	4 Sar an a da n Pra sar an a	579.680.764	4 Sar an a da n Pra sar an a	606.463.398	4 Sar an a da n Pra sar an a	662.706.929	20 Sar an a da n Pra sar an a	2.402.463.328	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolang un	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengel olaan Pajak Daerah	4 Sar ana da n Pra sar ana			4 Sar an a da n Pra sar an a	515.883.632	4 Sar an a da n Pra sar an a	541.772.571	4 Sar an a da n Pra sar an a	568.555.205	4 Sar an a da n Pra sar an a	624.798.736	20 Sar an a da n Pra sar an a	2.251.010.145	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengel	4 Sar ana da n Pra sar			4 Sar an a da n Pra	552.381.885	4 Sar an a da n Pra	578.444.556,01	4 Sar an a da n Pra	605.227.189,71	4 Sar an a da n Pra	661.470.721	4 Sar an a da n Pra	2.397.524.351	BP KP D Pro vin si Ja	J a m bi



			n Merangin	olaan Pajak Daera h	ana			sar an a		sar an a		sar an a		sar an a		sar an a		mb i	
			UPTD- PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupate n Kerinci	Jumla h Sarana dan Prasar ana Pengel olaan Pajak Daera h	4 Sar ana da n Pra sar ana			4 Sar an a da n Pra sar an a	552.3 81.88 5	4 Sar an a da n Pra sar an a		4 Sar an a da n Pra sar an a	605.2 27.18 9,71	4 Sar an a da n Pra sar an a	661.4 70.72 1	4 Sar an a da n Pra sar an a	2.397 .524. 352	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi
			Pengolah an, Pemeliha raan, dan Pelapora n Basis Data Pajak Daerah	Jumla h Lapora n Hasil Pengol ahan, Pemeli haraan , dan Pelapo ran Basis Data Pajak Daera h	12 Lap ora n	12 La por an	3.574 .139. 435	12 La por an	4.110 .260. 351	12 La por an	4.726 .799. 403	12 La por an	5.435 .819. 314	12 La por an	5.979 .401. 245	60 La por an	23.82 6.419 .747	BP KP D Pro vin si Ja mb i	J a m bi



			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	12 Laporan	624.671.768	12 Laporan	624.671.768	12 Laporan	655.905.356	12 Laporan	688.700.624	12 Laporan	757.570.686	60 Laporan	3.351.520.202	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 LHP	1 LHP	512.433.016	1 LHP	563.676.317	1 LHP	620.043.949	1 LHP	682.048.344	1 LHP	750.253.178	5 LHP	3.128.454.804	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
			Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	20 Laporan			BPKPD Provinsi Jambi	Jambi



				Pajak Daerah															
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	629.689.640	12 Laporan	629.689.640	12 Laporan	761.924.464	12 Laporan	838.116.910	12 Laporan	921.928.601	60 Laporan	3.781.349.255	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator - indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hal ini menetapkan indikator kinerja merupakan proses indentifikasi, pengembangan seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja dapat juga menjadi ukuran keberhasilan kegiatan dan program suatu instansi.

Hasil Rekapitulasi Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang mencapai setiap tujuan dan sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Indikator kinerja yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi lebih spesifik, terukur, lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan yang dilakukan.

Adapun indikator kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi adalah :

- Opini BPK
- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah
- Predikat Sakip

Indikator Program yang ingin dicapai BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Jambi pada tahun 2022-2026 sebagaimana tertera pada tabel 7.1 :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Predikat AKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	A
	Nilai IKM	85	86	87	88	89	90	90
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	74,38%	79,50%	84,62%	89,74%	94,86%	100	100%
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%	5,25%	5,70%	6,10%	6,40%	6,70%	6,70%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

BPKPD Provinsi Jambi



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2022 S.D 2026



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

No.	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	1.425.233.775.986,69	1.496.495.464.786,02	1.571.320.238.025,32	1.649.886.249.926,59	1.724.131.131.173,28
4	Pendapatan Retribusi Daerah	23.026.536.193,11	24.569.314.118,05	26.215.458.163,96	27.971.893.860,94	29.846.010.749,63
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.388.240.000,00	43.988.240.000,00	56.008.240.000,00	56.008.240.000,00	56.008.240.000,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	248.253.490.689,60	273.078.839.758,56	300.386.723.734,42	345.444.732.294,58	414.533.678.753,49
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.730.902.042.869,40	1.838.131.858.662,63	1.953.930.659.923,70	2.079.311.116.082,11	2.224.519.060.676,40
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	163.825.940.528,96	150.719.865.286,64	138.662.276.063,71	127.569.293.978,62	117.363.750.460,33
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	130.176.887.575,00	130.567.418.237,73	130.959.120.492,44		
12	Dana Alokasi Umum	1.361.909.493.342,00	1.397.319.140.168,89	1.433.649.437.813,28	1.470.924.323.196,43	1.509.168.355.599,54
13	Dana Alokasi Khusus	1.155.942.504.990,00	1.185.997.010.119,74	1.216.832.932.382,85	1.248.470.588.624,81	1.280.930.823.929,05
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	2.811.854.826.435,96	2.864.603.433.813,00	2.920.103.766.752,29	2.846.964.205.799,85	2.907.462.929.988,91
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
16	Dana Penyesuaian	18.433.747.000,00	18.433.747.000,00	18.433.747.000,00	18.433.747.001,00	18.433.747.002,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	18.433.747.000,00	18.433.747.000,00	18.433.747.000,00	18.433.747.001,00	18.433.747.002,00
18	Total Pendapatan Transfer	2.830.288.573.435,96	2.883.037.180.813,00	2.938.537.513.752,29	2.865.397.952.800,85	2.925.896.676.990,91
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
20	Pendapatan Hibah	1.623.600.000,00	1.664.190.000,00	1.705.794.750,00	1.748.439.618,75	1.792.150.609,22
21	Pendapatan Dana Darurat					
22	Pendapatan Lainnya					
23	Pendapatan Luar Biasa					
24	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	1.623.600.000,00	1.664.190.000,00	1.705.794.750,00	1.748.439.618,75	1.792.150.609,22
25	JUMLAH PENDAPATAN	4.562.814.216.305,36	4.722.833.229.475,63	4.894.173.968.425,98	4.946.457.508.501,71	5.152.207.888.276,54